

PEMILU INDONESIA: KIBLAT NEGARA DEMOKRASI DARI BERBAGAI REPRESENTASI¹**Farahdiba Rahma Bachtiar**Email: farahdibabachtiar@gmail.com

Staf pengajar tidak tetap di jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIP UNHAS

Abstract

Indonesia has been present and is still able to maintain itself as a democracy icon that should be followed by other countries. As one of the largest democracies in the world, Indonesia in more than ten years is continue growing and transforming with its diversity in society, the dynamics and diversity issues. Indonesia was still able to maintain its identity as a democracy. Through these facts, this paper tried to describe the political situation in Indonesia in the 2014 Presidential Election, as well as reflect further on the response and the effect of foreign parties to the democratic mechanism. What happens in the electoral process in recent months and how Indonesia continues to become an example of the success stories of various identity democracies as diverse as a multicultural country, developing countries, as well as the country with the largest Muslim adherents in the world. This paper sees the problem through the concept of elections and democracy based on the analysis of identity. Where the author tried to look outside the box of the electoral process in the domestic political analysis that has been done before. Probe Indonesia based on its identity in the international sphere as a democratic state becomes interesting when its identity was assessed by comparing it with other identities such as identity and role as a developing country and collective identity as the Southeast Asian country. The papers argue that the election process in Indonesia is not only shaped by domestic factors. Indonesia democratization maturity today can't be separated from the support of international and Indonesian efforts in playing a role and maintain its identity as a democratic country in the international sphere.

Keywords: democracy, election, identity

A. Pengantar

Tulisan ini berusaha menggambarkan kondisi politik di Indonesia dalam Pemilu Presiden 2014, sekaligus merefleksi lebih jauh mengenai tanggapan dan pengaruh pihak asing terhadap mekanisme demokratis tersebut. Bagaimana proses dan pola pemilu Indonesia dan bagaimana Indonesia terus mampu menjadi contoh dari kisah sukses negara demokrasi dari berbagai identitasnya yang beragam sebagai negara multikultural, negara berkembang, dan juga sebagai negara dengan penganut muslim terbesar di dunia. Hal menarik dari identitas yang beragam tersebut menjadikan Indonesia representasi dari

¹ Penulis adalah staf pengajar tidak tetap di jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIP UNHAS

berbagai latar belakang yang saling mendukung namun bisa pula saling bertentangan. Realitanya, Indonesia telah hadir dan masih mampu mempertahankan diri sebagai ikon negara demokrasi yang patut dicontoh oleh negara-negara lain.

Adapun tulisan ini berusaha melihat proses Pemilu di luar kotak analisis politik dalam negeri yang telah banyak dilakukan sebelumnya. Menelisik Indonesia berdasarkan identitasnya dalam lingkup internasional sebagai negara demokratis menjadi menarik ketika identitas itu dikaji dengan membandingkannya dengan identitas lainnya seperti identitas peran sebagai negara berkembang dan identitas kolektif sebagai negara Asia Tenggara. Argumen penulis adalah proses pemilu di Indonesia tidak hanya dibentuk oleh faktor-faktor domestik. Kedewasaan demokratisasi Indonesia hari ini tidak lepas dari dukungan pihak internasional dan upaya Indonesia sendiri dalam memainkan peran dan mempertahankan identitasnya sebagai negara demokrasi di ranah internasional.

Lebih jauh, tulisan ini mencakup tiga bagian dengan pengantar sebagai bagian pertama, kemudian pemilu Indonesia makna dan proses yang akan lebih banyak menggambarkan kondisi pemilu terutama pemilu Presiden 2014, lalu bagian ketiga tentang kisah Indonesia mempertahankan identitas negara demokrasi dalam konstelasi dunia internasional yang masih belum stabil, bagian keempat tentang bagaimana Indonesia masih menjadi Kiblat Negara Demokrasi Dunia dan pada bagian terakhir memuat garis besar isi tulisan secara keseluruhan.

B. Konsepsi Negara Demokrasi dan Pemilu

Secara umum pemilihan umum lahir dari konsepsi dan gagasan besar Demokrasi yang berarti merujuk John Locke dan Rousseau, keterjaminan kebebasan, keadilan dan kesetaraan bagi individu dalam segala bidang. Dalam demokrasi, ada nilai-nilai partisipatif dan kedaulatan yang dijunjung tinggi dan harus dijalankan oleh warga negara dan instrumen negara baik pada level legislatif, yudikatif maupun eksekutif. Hubungan antara warga negara dan negara meskipun masih berjarak namun dapat difasilitasi oleh berbagai lembaga dan elemen masyarakat karena adanya kebebasan bagi semua pihak untuk ikut serta secara aktif dalam pembangunan nasional baik pembangunan politik maupun bidang-bidang lainnya. Masyarakat diberikan ruang untuk berperan aktif dan menjadi bagian dari proses demokrasi. Meskipun secara substansial, keikutsertaan mereka masih cenderung prosedural dan momentum.

Salah satu ‘pabrik’ dari elemen demokrasi dihasilkan dari proses pemilihan umum. Di sisi lain, partai politik Indonesia masih bergerak lamban dan bahkan banyak di antaranya masih menjadi pragmatis dalam menjalani tanggung jawabnya sebagai lembaga politik yang seharusnya menciptakan kaderisasi yang sehat, baik dan mumpuni. Sehat dalam bergerak, baik dalam memutuskan arahnya dan mumpuni dalam menciptakan kader-kader terbaik yang akan memimpin. Alhasil, kebijakan publik menjadi kebijakan kelompok tertentu dan kesejahteraan segelintir orang. Padahal dalam konteks sistem demokrasi yang ideal, partai politik merupakan lembaga agregasi politik yang paling besar. Partai politik menjadi wadah berkumpulnya kepentingan publik, mengartikuluskannya dalam kebijakan dan membangun struktur untuk individu-individu berpartisipasi dalam politik. Di samping itu, partai politik juga berperan dalam mengontrol pemerintah dari luar sistem dengan menjadi oposisi.²

Namun demikian, menurut Edmund Burke orang-orang yang terpilih untuk menjadi bagian dalam lembaga perwakilan, tidak hanya mewakili konstituen mereka. Mereka memiliki tanggung jawab untuk mewakili kepentingan masyarakat luas dan bukan segelintir pihak.³ Oleh karena itu, seorang kader atau calon dari partai yang akan menduduki kursi kekuasaan entah pada tingkat eksekutif maupun legislatif hanya menjadi politisi untuk partainya ketika dia masih berada di luar sistem kekuasaan dan akan menjadi abdi bagi negara ketika sudah menduduki kursi kekuasaan.

Sayangnya, dalam kenyataannya terutama pada Negara berkembang⁴, idealisme tersebut tampak utopis. Partai politik baik dalam segi kaderisasi maupun visi dan misi tenggelam pada pragmatisme ‘kekuasaan dan uang’. Partai politik menjadi tumpul dalam menjalankan perannya baik secara internal terhadap kader maupun terhadap eksternal yakni publik dan negara. Di Indonesia, partai politik merupakan satu-satunya lembaga resmi yang diakui oleh undang-undang sebagai lembaga kader yang mampu mencalonkan

²Norm Kelly dan Sefakor Ashiagbor, *Partai Politik dan Demokrasi dalam Perspektif Teoritis dan Praktis*. (Washington DC: National Democratic Institute., 2011). Hal. 3

³Chicaho University. *Edmund Burke Speech to the Electors of Bristol 3 Nov. 1774*. <http://press-pubs.uchicago.edu/founders/documents/v1ch13s7.html> Diakses pada tanggal 21 November 2014

⁴Negara-negara berkembang baik di kawasan Asia maupun Afrika bahkan Amerika Latin cenderung memiliki sistem politik dan pemerintahan yang lemah. Persoalan korupsi, kekacauan politik seperti kudeta dan konflik kekuasaan menjadi hal yang bisa ditemui di negara-negara berkembang. Lihat FRANCES HAGOPIAN (ed.) .2005. *The Third Wave of Democratization in Latin America Advances and Setbacks*. Cambridge: Cambridge University Press. http://isites.harvard.edu/fs/docs/icb.topic925740.files/Week%206/Mainwaring_Latin.pdf Diakses pada tanggal 12 November 2014

kandidat pada kursi legislatif dan eksekutif.⁵ Tanggung jawab itulah yang menjadikan partai politik memiliki ‘daya tawar’ yang besar dalam sebuah sistem demokrasi. Daya tawar di sini mengarah kepada besarnya peran partai untuk bekerja dengan baik sehingga menciptakan kader yang siap dalam mengolah kekuasaan.

Lemahnya partai politik, seringkali dianggap sebagai biang kerok dari segala kekacauan politik di Indonesia. Partai politik yang dalam pemilu presiden harus mencapai minimal 20 % suara dalam pemilu legislatif untuk bisa mengajukan calon tanpa koalisi, harus bekerja keras dalam menggalang dukungan guna mencapai target tersebut.⁶ Sedangkan dalam pemilu kepala daerah, untuk bisa dicalonkan seorang kandidat dari partai politik harus memiliki minimal 15 % dari keseluruhan suara. Hal ini membuat kandidat harus mengeluarkan dana untuk menggalang dukungan suara partai pengusung. Dalam data yang pernah dikeluarkan oleh Kompas, dana untuk pencalonan kepala daerah saja bisa mencapai 60 hingga 100 miliar. Dana fantastis yang tidak setara dengan pendapatan bulanan seorang kepala daerah.⁷

Untungnya, kelemahan ini selalu mampu dikritisi oleh kekuatan-kekuatan dari kaum terpelajar dan mereka yang senantiasa setia pada idealisme advokasinya. Ketidakmampuan dan ketidakcakapan pada wakil-wakil rakyat pada akhirnya membangun pesimisme terhadap partai politik yang membentuknya. Konstituen hanya menjadi penting tatkala mereka belum menjadi siapa-siapa. Kampanye program-program yang lebih banyak tidak jelas dan tidak terarah kemudian tinggal menjadi janji-janji yang tidak pernah ditepati ketika para wakil rakyat tersebut telah terpilih. Sehingga, pencapaian dari kebijakan-kebijakan yang dilakukan tidak dapat diukur.

Tidak kalah penting, kehadiran media yang terus menerus menyorot isu-isu yang menyimpang dari prinsip-prinsip demokrasi. Seperti halnya yang banyak terjadi di negara-negara demokrasi maju, media menjadi kekuatan keempat di luar pemerintah dan legislatif serta masyarakat. Dalam demokrasi, media dianggap sebagai *watch dog* yang menjaga keberlangsungan demokrasi dan kepentingan publik. Meski pada saat yang sama, media

⁵Kopel.. *Pembiayaan Partai Politik Sulawesi Selatan*, Penelitian Kerjasama Kemitraan dan Kopel, 2013.

⁶Kopel. *Pembiayaan Partai Politik Sulawesi Selatan*. Penelitian Kerjasama Kemitraan dan Kopel, 2013.

⁷Puskapol. 2014. “Lembar Fakta”. <http://www.puskapol.ui.ac.id/wp-content/uploads/2014/10/LEMBAR-FAKTA-PILKADA-LANGSUNG.pdf> Diakses pada tanggal 12 November 2014

kemudian menjadi alat dari permainan politik dari pemilik modal dan kuasa. Memainkan wacana dan saling menyemburkan isu panas demi membangun persepsi negatif terhadap lawan politiknya. Sehingga, media yang seharusnya bisa menjadi media informasi, pendidikan dan mobilisasi ternyata menimbulkan sinisme publik dan terhambatnya demokrasi.⁸

C. Mengenal Identitas sebuah Negara

Menurut Tip O'Neill, "*all politics are identities; all identities are political*".⁹ Dalam perspektif konstruktivis, identitas dianggap sebagai sesuatu yang dikonstruksikan, mengalir dan bertambah (*multiply*).¹⁰ Identitas memiliki dua makna, yakni makna praktik dan sekaligus sebagai analisis.¹¹ Bermakna praktis ketika identitas oleh agen digunakan untuk memahamkan siapa diri mereka (*making sense of them self*), tentang siapa mereka dan apa kepentingannya. Ketika mereka telah mengenal diri mereka, identitas itu kemudian digunakan untuk mengidentifikasi diri mereka untuk menjadi bagian dari entitas-entitas lain yang 'sama' dan membuat garis terhadap siapa mereka dan siapa yang berbeda dengan mereka.

Berdasarkan identifikasi itulah kemudian sebuah entitas bertindak. Sedangkan ia bermakna analisis pada bagaimana istilah tersebut digunakan. Paling tidak ada empat makna yang bisa diperoleh dari sebuah istilah identitas. Pertama, identitas dapat dipahami sebagai basis tingkah laku dimana sebuah entitas politik bertindak bukan berdasarkan *self interest* yang universal namun oleh *self understanding* tertentu.¹² Kedua, identitas juga dapat dimaknai sebagai istilah yang digunakan untuk memahami fenomena kolektif terhadap kesamaan secara mendasar antara entitas-entitas di dalamnya yang menjadikan mereka 'sekelompok'.¹³ Ketiga, identitas dimaknai sebagai konsep inti dalam menjelaskan 'selfhood' baik secara individual maupun secara kolektif. Keempat, identitas dapat dimaknai

⁸Sheila S. Coronel. 2001. *The Role Of The Media In Deepening Democracy*. <http://unpan1.un.org/intrdoc/groups/public/documents/un/unpan010194.pdf> Diakses pada tanggal 22 November 2014

⁹Richard Thompson Ford. 2005. *Political Identity as Identity Politics* (Harvard Unbound, Vol. 1: 53, 2005) Hal. 1

¹⁰Rogers Brubaker dan Frederick Cooper. *Beyond Identity*. (Theory and Society 29: 1 47, 2000. Kluwer Academic Publisher, 2000) Hal.1

¹¹Rogers Brubaker dan Frederick Cooper. *Beyond Identity*. Hal.4

¹²Rogers Brubaker dan Frederick Cooper. *Beyond Identity*. Hal. 5

¹³Rogers Brubaker dan Frederick Cooper. *Beyond Identity*. Hal. 7

sebagai produk sosial atau politik yang menekankan pada perkembangan yang interaktif dan berproses dari *self understanding* kolektif.¹⁴ Kelima, identitas dipahami dalam pertentangan diskursus mengenai konsep ‘diri’ yang tidak stabil, banyak, terpisah-pisah, dan fluktuatif. Dalam pemaknaan kelima, identitas banyak digunakan dalam literatur kaum posmodernis.¹⁵

Dalam analisa yang lebih fokus mengenai negara, identitas negara merujuk pada Wendt, terdiri dari empat identitas, yakni *corporate*, *type*, *role*, dan *collective*. Berdasarkan empat macam identitas tersebut, negara memiliki identitas berbeda-beda dan kompleks.¹⁶ Namun, keempat identitas tersebut dapat dimiliki oleh sebuah negara sekaligus. Dengan kata lain, setiap negara bisa saja memiliki lebih dari satu identitas. Namun, bisa saja tidak memiliki salah satu identitas tersebut.

Adapun identitas tersebut dapat dibedakan satu sama lain berdasarkan pola pembentukannya. Pertama, identitas *corporate* terbangun dari pengaturan diri sebuah negara.¹⁷ Dengan kata lain, sebuah identitas *corporate* negara hanya akan terbentuk dan melekat pada dirinya jika individu negara tersebut membangun identitas kolektif sebagai satu kesatuan negara.¹⁸ Identitas kedua yakni identitas tipe dipahami sebagai identitas yang terbentuk dari proses sosial. Jika dimisalkan individu, identitas ini merupakan pengelompokan individu secara sosial berdasarkan karakter material dan nonmaterial yang melekat dalam dirinya.¹⁹ Untuk tingkat negara, identitas ini dapat terbangun dari sistem yang digunakan dalam sebuah negara misalnya dilihat dari tipe rezim maupun bentuk sebuah negara. Pengelompokan negara berdasarkan negara kapitalis, fasis, kerajaan, republik, atau lainnya adalah contoh dari identitas tipe.²⁰ Berbeda dengan kedua identitas sebelumnya, identitas peran sangat berkaitan dengan budaya dan hanya akan terbentuk jika terbangun hubungan dengan pihak lain.²¹ Sehingga, identitas peran tidak diperoleh begitu saja berdasarkan nilai apa yang dimiliki negara sebelumnya, namun dari

¹⁴Rogers Brubaker dan Frederick Cooper. *Beyond Identity*. Hal. 5

¹⁵Rogers Brubaker dan Frederick Cooper. *Beyond Identity*. Hal. 8

¹⁶Peter J. Katzenstein.. *The Culture of National Security: Norms and Identity in World Politics* (New York: Columbia University Press, 1996) Hal.1

¹⁷Alexander Wendt. *Social Theory of International Relations*. (Cambridge: Cambridge University Press, 1999) Hal.224 dan 225

¹⁸Alexander Wendt. *Social Theory of International Relations*. Hal.224 dan 225

¹⁹Alexander Wendt. *Social Theory of International Relations*. Hal.224 dan 225

²⁰Alexander Wendt. *Social Theory of International Relations*. Hal.226

²¹Alexander Wendt. *Social Theory of International Relations*. Hal.227

tindakan yang sesuai dengan identitas yang disandangnya. Identitas terbentuk dari tindakan yang dilakukan oleh negara dan tindakan tersebut didasarkan pada norma tertentu yang mereka pahami dalam struktur sosial internasional.²²

Terakhir, identitas kolektif merupakan gabungan antara identitas peran dan identitas tipe. Identitas ini terbangun dari sisi sosial sekaligus sisi yang berasal dari dalam diri sebuah negara. Proses tersebut terjadi ketika sebuah negara tidak sekedar melihat kesejahteraan negara lain semata sebagai kesejahteraan negara itu sendiri. Namun lebih dari itu, negara tersebut memahami negara lain sebagai bagian dari dirinya. Sehingga, mendorong negara untuk melakukan tindakan bersama atau kolektif dalam menyelesaikan masalah mereka.²³

D. Model, Proses dan Hasil Pemilu Presiden Indonesia

Pemilihan umum merupakan salah satu bagian dari proses sekaligus hasil dari sebuah sistem demokrasi. Meski demokrasi secara substansial dengan nilai-nilai yang menjunjung tinggi keterbukaan, kebebasan dan hak asasi baru sepenuhnya dijalankan pasca runtuhnya kekuasaan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto, Indonesia sendiri sebenarnya telah mengenal Pemilihan Umum pertama sejak tahun 1955 hingga yang terakhir pada 2014 lalu. Pemilihan Umum yang pertama dilaksanakan pada masa Orde Baru ketika Presiden Soekarno menjabat dengan keikutsertaan empat partai besar yakni PNI, NU, PKI dan Masjumi serta beberapa partai kecil lainnya seperti Partai Katholik, Parkindo dan PSII.²⁴ Setelah masa Pemilu Orde Lama, Pemilu selanjutnya diadakan pada tahun 1971 ketika Orde Baru dengan keikutsertaan sepuluh partai.²⁵ Setelah serangkain pemilu yang 'dikuasai' oleh Orde Baru dengan hanya mengizinkan tiga partai yakni PPP, PDI dan Golkar. Fase reformasi membawa Indonesia pada Pemilu 1999, dimana partai dikembalikan pada fungsi awalnya. Kemudian diadakan kembali pada 2004 dengan perkembangan pada pola pemilihan presiden yang dilakukan secara langsung. Setelah pelaksanaan pemilu dengan sistem pemilihan presiden langsung, maka pada tahun 2009, diadakan kembali sistem pemilu yang

²²Alexander Wendt. *Social Theory of International Relations*. Hal.227

²³Alexander Wendt. *Social Theory of International Relations*. Hal.229

²⁴Alfian. *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia* (Jakarta: Gramedia,1981). Hal. 307

²⁵Kemenkumham. *Partai Politik Dan Demokrasi Indonesia Menyongsong Pemilihan Umum 2014*. *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol.9 No.4 Desember 2014. Hal.509.

sama dengan perbaikan pada beberapa kekurangan pada pemilu sebelumnya. Terakhir, pemilu diadakan pada April 2014 untuk pemilihan legislatif pusat dan daerah dan pada bulan Juli 2014 untuk pemilihan Presiden dengan berbagai perbaikan sebagai hasil dari evaluasi terhadap pemilu sebelumnya termasuk pada 2009 yang ternyata memendam banyak persoalan.

Sistem pemilu di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan utama dan undang-undang lainnya yang lebih terperinci yakni Undang-Undang 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Undang-Undang 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Undang-Undang 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (mencakup pemilu kepala daerah), Undang-Undang 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, Undang-undang 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.²⁶ Keseluruhan landasan hukum tersebut mencerminkan sistem demokrasi Indonesia yang telah tertanam dan terus diperbaharui.

Model pemilu Indonesia memiliki karakteristik tersendiri jika dibandingkan dengan negara demokrasi lainnya. Sebagai negara dengan struktur pemerintahan yang berjenjang, pemilu Indonesia pun diadakan pada pada hampir semua level dalam struktur kekuasaan baik pada tingkat eksekutif maupun legislatif. Mulai dari pemilu tingkat presiden sebagai kepala negara hingga kepada kepala desa yang memerintah pada tingkat terbawah dalam stuktur eksekutif. Begitu pula dengan lembaga legislatif yang dipilih pada tingkat daerah dan pusat. Berdasarkan sistem administrasinya, pemerintahan daerah di Indonesia dibagi menjadi 34 provinsi yang terdiri atas 508 kabupaten (pedesaan) dan kota (perkotaan), 6.994 kecamatan, dan 81.253 kelurahan (perkotaan) dan desa (pedesaan).²⁷

Berdasarkan jenjang waktunya, Pemilu Presiden dan legislatif dilaksanakan setiap lima tahun. Berbeda dengan pemilu pada tingkat pusat, pemilihan eksekutif tingkat sub-nasional atau daerah (Pemilihan Kepala Daerah atau *Pemilukada*) dilaksanakan secara terputus berdasarkan masa jabatan atau alasan lain sesuai ketentuan undang-undang. Hal

²⁶Rumah Pemilu.2014. "Gambaran Singkat Pemilihan Umum 2014". Diakses pada <http://www.rumahpemilu.org/in/read/4030/Gambaran-Singkat-Pemilihan-Umum-2014-di-Indonesia>.

²⁷Rumah Pemilu. *Gambaran Singkat Pemilihan Umum 2014*..

ini membuat pengadaan pemilu dilakukan hampir setiap hari di Indonesia. Di samping pengadaan pemilu yang berjenjang, dalam hal jumlah elektorat, pemilu di Indonesia adalah pemilu-satu-hari kedua terbesar di dunia –setelah Amerika Serikat. Kategorisasi terbesar didasarkan bahwa Indonesia menjadi salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia yakni sekitar 237,56 juta jiwa. Jumlah terbesar tersebut didorong pula oleh ketentuan keikutsertaan dalam pemilu. Di mana batas umur minimal sebagai pemilih adalah 17 tahun (pada hari pemilihan) atau usia berapapun asalkan telah atau pernah menikah. Hal ini berbeda misalnya dengan ketentuan pemilih di negara lain yang biasanya di tingkat usia 21 tahun. Daftar pemilih Pemilu 2014 saja berdasarkan data pemilih sementara sebelum Pemilu 2014 dilakukan berjumlah 187.977.268 pemilih. Meski demikian, partisipasi dalam pemilu tidak sebesar atau seratus persen dari daftar tersebut. Dari besaran jumlah pemilih, untuk Pemilu 2009 yakni 171 juta pemilih terdaftar, hanya 122 juta pemilih yang menggunakan hak pilihnya atau sebesar 71 %. Sedangkan pada Pemilu 1999 dan 2004 masing-masing besaran partisipasi mencapai 93 % dan 84 %.²⁸

Dalam dokumen Libtang Kompas, Pemilu Indonesia dianggap sebagai kegiatan kepemiluan paling kompleks di dunia. Hal ini dikarenakan berdasarkan data yang dimiliki Kompas, untuk setiap pemilu ada empat juta petugas di 550.000 TPS, yang tersebar di berbagai penjuru sebuah negara yang terdiri atas 17.000 pulau, bertugas mengelola 700 juta surat suara dengan 2.450 desain yang berbeda untuk memfasilitasi pemilihan 19.700 kandidat dalam satu Pemilu presiden dan 532 dewan perwakilan di tingkat nasional dan daerah.²⁹

Pemilu Indonesia yang kompleks tidak lepas dari eksistensi partai politik. Indonesia sendiri sejak awal berdirinya telah mengenal partai sebagai wadah perjuangan melawan kolonialisme. Ada berbagai macam partai dengan berbagai macambasis ideologi, dari religius, nasionalis bahkan komunis.³⁰ Eksistensi partai yang beragam tersebut terus ada hingga kini dimana Indonesia menganut sistem multi partai. Menurut catatan Kementerian Hukum dan Hak pada Pemilu 2009, terdapat 38 partai politik nasional dan enam partai politik Aceh yang bersaing hanya untuk daerah Aceh. Namun, hanya ada sembilan partai

²⁸Rumah Pemilu. *Gambaran Singkat Pemilihan Umum 2014.*

²⁹Rumah Pemilu. *Gambaran Singkat Pemilihan Umum 2014.*

³⁰Kemenkumham. *Kemenkumham. Partai Politik Dan Demokrasi Indonesia Menyongsong Pemilihan Umum 2014. Jurnal Legislasi Indonesia Vol.9 No.4 Desember 2014. Hal.509*

politik yang mendapatkan kursi di DPR. Setelah Pemilu 2009, standar keikutsertaan pemilu direvisi dan menghasilkan aturan baru bagi legalitas partai. Dimana partai politik harus memiliki kantor cabang (yang sifatnya permanen) di 33 provinsi, kantor cabang (yang sifatnya permanen) di setidaknya 75 persen kabupaten/kota tiap provinsi, dan kantor cabang (tidak harus permanen) di setidaknya 50 persen kecamatan dalam kabupaten atau kota tersebut. Berdasarkan aturan itulah, pada Pemilu 2014, dari 46 partai politik yang mendaftarkan diri, hanya dua belas partai politik nasional dan tiga partai politik lokal (Aceh) yang berhasil lolos dalam pemilu.

Dalam segi kelembagaan, sistem pemilu di Indonesia ditangani oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU). KPU merupakan lembaga konstitusional yang bekerja secara independen untuk menyelenggarakan pemilihan umum nasional dan lokal sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 15 Tahun 2011. Ketua dan anggota KPU pusat terdiri dari 7 anggota yang dipilih melalui proses seleksi yang ketat dan kemudian dilantik oleh Presiden untuk jangka waktu lima tahun. Begitupula dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang dipilih melalui proses seleksi dan dilantik oleh presiden dengan keanggotaan pada tingkat nasional sebanyak 5 orang.³¹ Mereka bertugas melakukan pengawasan terhadap kinerja KPU dan keseluruhan proses pemilu dari pra hingga pasca.

Secara khusus untuk Pemilu Presiden yang dipilih sebagai kepala negara dan pemerintahan, pemilihan dilakukan pula secara langsung. Dimana calon presiden dapat dipilih sebanyak-banyaknya dua kali untuk jangka waktu masing-masing lima tahun. Calon presiden mendaftarkan diri setelah resmi diusung oleh partai politik. Ketentuannya, sebuah partai politik atau koalisi partai politik baru bisa mengajukan calon untuk pasangan Presiden dan Wakil Presiden jika memenangkan 25 persen suara sah atau memperoleh paling sedikit 20 persen kursi DPR. Oleh karena itu, sebelum Pemilu Presiden diadakan, terlebih dahulu diadakan Pemilu legislatif. Adapun Pemilu Presiden dilakukan dalam dua putaran. Jika seorang calon tidak mencapai mayoritas suara absolut pada putaran pertama, maka dilaksanakan putaran kedua antara dua kandidat yang memperoleh suara terbanyak. Dalam sejarah Pemilu Presiden langsung, Mantan Presiden, Susilo Bambang Yudhoyono, terpilih

³¹Rumah Pemilu. *Gambaran Singkat Pemilihan Umum 2014*. Diakses pada <http://www.rumahpemilu.org/in/read/4030/Gambaran-Singkat-Pemilihan-Umum-2014-di-Indonesia>

dua kali yakni pada Pemilu 2004 dan Pemilu 2009 dengan perolehan 60,8 persen jumlah suara.³²

Kisah Indonesia sebagai Kiblat Demokrasi

Demokrasi di Indonesia sendiri mengalami dinamika dengan pola dan karakteristiknya sendiri. Menduduki posisi sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia selain Amerika Serikat dan India³³, mengalami masa ‘demokratisasi gelombang ketiga’ bersama Malaysia, Filipina dan Thailand, Indonesia memasuki fase perubahan yang signifikan dalam politik dan pemerintahannya. Sepuluh tahun lebih sejak awal demokratisasi Indonesia terjadi, demokrasi Indonesia cenderung lamban untuk mencapai ‘kestabilannya’. Meski demikian dibandingkan dengan negara Asia Tenggara dan negara berkembang lainnya, Indonesia menjadi negara dengan perkembangan keterbukaan politik yang paling meluas.³⁴ Indonesia juga menjadi negara tanpa kudeta militer atau pemberontakan berdarah. Bahkan hingga pemilu terakhir pasca reformasi, Indonesia tidak pernah jatuh kembali pada sistem otoritarian.³⁵ Ini menjadi indikasi bahwa Indonesia memiliki kecenderungan untuk berkembang dengan sistem tersebut. Menurut Ikrar Nusa Bhakti, Indonesia mengalami empat fase menuju kedewasaannya sebagai negara demokrasi yang mapan, yakni pra-transisi, liberalisasi, transisi demokrasi dan yang terakhir dan masih berproses hingga saat ini yakni fase konsolidasi demokrasi.³⁶

Kisah Indonesia sebagai negara demokrasi menjadi unik karena Indonesia memiliki identitas peran sebagai negara berkembang dan identitas kolektif sebagai negara Asia Tenggara. Sebagai negara berkembang, Indonesia menunjukkan bahwa kemajuan ekonomi

³²Rumah Pemilu. *Gambaran Singkat Pemilihan Umum 2014*.

³³Michael Buehler. *Islam and Democracy in Indonesia Insight Turkey*. (Insight Turkey: Vol. 11 / No. 4 / 2009) Hal.51

³⁴Berdasarkan survei Freedom House antara 2005 hingga 2010, Indonesia menjadi satu-satunya negara Asia Tenggara yang masuk dalam peringkat negara ‘bebas’. Lihat <http://polisci.berkeley.edu/sites/default/files/people/u3833/Civic%20Engagement%20and%20Democracy%20in%20Indonesia.pdf>

³⁵Republika.2014. *Terima Gelar Doktor HC Dari Jepang, SBY Bicara Soal Demokrasi*. <http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/14/09/29/ncn99h-terima-gelar-doktor-hc-dari-jepang-sby-bicara-soal-demokrasi>

³⁶Ikrar Nusa Bhakti. *The Transition To Democracy In Indonesia: Some Outstanding Problems*. Dalam *In The Asia Pacific : A Region in Transition* , ed. Jim Rolfe. (Honolulu: The Asia Pacific for Security Studies) Hal. 200

bisa sejalan dengan kemajuan dalam bidang politik. Selama ini, ada banyak negara berkembang yang masih berkuat pada sistem otoritarian. Adapun yang mengalami 'fase ketiga dalam demokratisasi' seperti halnya Indonesia ternyata juga masih stagnan dalam bertransformasi. Entah masih lemah dalam legalitas, pola maupun kinerja sistem politik yang masih tertutup dan terbatas atau struktur yang masih sama. Sedangkan demokrasi Indonesia, meski masih memiliki banyak kelemahan namun terus bertransformasi ke arah yang lebih baik. Hal itu dapat dilihat dari berbagai sisi, mulai dari pola sistem politik dan pemerintahan yang makin mencapai titik 'pas'-nya, lembaga negara, hukum dan perwakilan yang terus diawasi dan direformasi, berjalannya fungsi pengawasan dari media, organisasi masyarakat dan keterbukaan informasi dan penegakan hukum. Salah satu bukti tersebut tergambar melalui kinerja KPK yang berhasil memenjarakan koruptor baik dari legislator maupun pejabat pemerintah termasuk besan presiden pada 2008.³⁷

Selain itu, kedewasaan demokratisasi Indonesia hari ini tidak lepas dari dukungan pihak internasional dan upaya Indonesia sendiri dalam memainkan peran dan mempertahankan identitasnya sebagai negara demokrasi di ranah internasional. Indonesia menjadi inisiator dalam banyak kegiatan baik pada level regional maupun internasional terkait demokrasi. Di era kepemimpinan Megawati Sukarnoputri, Indonesia mendorong reformasi ASEAN dan menjadi inisiator komisi HAM. Pada masa kepemimpinan SBY, Indonesia makin membuktikan komitmennya terhadap demokrasi bahkan di luar batas regional dengan melakukan aksi unilateral seperti Democracy Forum. Pada saat Bali Concord II, Indonesia menjadi pendorong dalam Piagam ASEAN pada 2007 dengan menjadikan isu HAM sebagai prinsip fundamental dalam ASEAN. Sehingga kemudian terbentuklah badan HAM ASEAN yang terbentuk pada 2009.³⁸

Menjadi negara demokratis bagi Indonesia juga bukanlah perkara yang mudah jika melihat faktor kultural dan agama dalam masyarakatnya yang majemuk. Memiliki penduduk 230 juta jiwa dengan 85 % di antaranya merupakan muslim menjadikan Indonesia negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia.³⁹ Indonesia juga merupakan negara paling beragam dari sisi budaya dan bahasa. Terdapat sekitar 400 bahasa lokal/daerah untuk

³⁷Lowy Institute. *Indonesia's 2009 Elections: Populism, Dynasties and the Consolidation of the Party System*. (Lowy Institute 2009). Hal.6

³⁸Gerd Schönwälder. *Promoting Democracy What Role for the Democratic Emerging Powers?* (Discussion Paper 2/2014) Hal.22

³⁹Michael Buhler. *Islam and Democracy in Indonesia Insight Turkey*. (Insight Turkey: Vol. 11 / No. 4 / 2009) Hal.51

keseluruhan wilayah Indonesia di luar wilayah Papua⁴⁰ dan ada sekitar 300 etnis yang hidup di 17,508 pulau yang ada di Indonesia.⁴¹

Indonesia juga menjadi percontohan bagi negara-negara di dunia terutama di antara negara berkembang dan negara-negara Asia.⁴² Indonesia mengambil *leading role* terhadap negara-negara demokrasi yang telah ada. Pemikiran bahwa Islam dan demokrasi tidak kompitabel ternyata tidak terbukti dalam kasus Indonesia. Selama ini budaya atau agama dianggap menghambat proses demokratisasi dan menjadi pembenaran terhadap sistem politik di negara-negara Arab.⁴³ Indonesia dengan mayoritas masyarakat muslimnya mampu menerapkan model demokrasi yang bahkan lebih demokratis dibandingkan dengan negara-negara yang dianggap sebagai penggagas demokrasi.

Dibanding negara lain, Indonesia telah memiliki landasan yang kuat sebagai negara demokrasi. Fakta material itu bisa ditemukan dalam sistem politik dan pemerintah Indonesia dimana Indonesia merupakan sebuah negara Republik Perwakilan. Berbeda dengan Malaysia maupun Thailand misalnya, presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Konstitusi Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menjadi landasan legal yang memisahkan secara terbatas kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif.⁴⁴ Selain itu, adanya aturan dan perundangan yang jelas dan mengikat menjadi basis legitimasi bahwa Indonesia memang berdiri dengan sistem yang demokratis. Tidak hanya berdasarkan hal-hal prosedural, namun juga pada hal-hal substansial semisal keterwakilan minoritas dan perempuan, keterbukaan media, kebebasan berkelompok dan

⁴⁰Zane goebel. *Enregistering Ethnicity and Hybridity in Indonesia*. (JSL:Volume 4:2008) Hal. 37–50

⁴¹Aung Kyaw Phyo. *Policy Outcomes In Indonesia Before And After Democratization*. Diakses pada http://www.martin.uky.edu/centers_research/Capstones_2012/Phyo.pdf tanggal 21 November

⁴²Kompas. *Negara Lain Memandang Islam dan Demokrasi Jalan Beriringan*. Diakses pada <http://nasional.kompas.com/read/2014/12/19/17522321/.Negara.Lain.Memandang.Indonesia.karena.Islam.dan.Demokrasi.Jalan.Beriringan>. Tanggal 22 November 2014.

⁴³Sana Hana. *Democracy and Islam in Indonesia: The 'Perfect Model' for Islam and Democracy?*. Diakses pada <http://www.lboro.ac.uk/media/wwlboroacuk/content/phir/documentsandpdfs/topstudentessays/11EUC664%20essay%20-%20Sini%20Haara%20-%20Indonesia%20%20The%20E2%80%98Perfect%20Model%E2%80%99%20for%20Islam%20and%20Democracy.doc.pdf>. Lihat Ghassan Salame, *Introduction: Where Are the Democrats?*, dalam *Democracy Without Democrats?: The Renewal of Politics in the Muslim World*, ed. Ghassan Salame (London: I.B. Tauris, 1994) Hal. 3

⁴⁴Rumah Pemilu. *Gambaran Singkat Pemilihan Umum 2014*. Diakses pada <http://www.rumahpemilu.org/in/read/4030/Gambaran-Singkat-Pemilihan-Umum-2014-di-Indonesia>

hak asasi manusia yang dijamin oleh negara. Legitimasi tersebut telah ada seperti halnya yang dimiliki oleh negara-negara maju seperti Inggris dan Australia. Di Australia misalnya, kebijakan Partai Buruh mengharuskan perempuan dipilih terlebih dahulu untuk mengisi paling sedikit 40 persen dari kursi yang 'dapat dimenangkan' pada pemilihan umum.⁴⁵ Sedangkan di Indonesia, legalisasi keterlibatan perempuan terkandung dalam kuota kursi yang disiapkan khusus bagi perempuan sebesar 30 %.

Kualitas demokrasi di Indonesia dengan melihat hasil yang dicapai dalam kehidupan masyarakat tentu masih jauh dari tujuan demokrasi yang mensejahterakan dan memenuhi hak-hak individu. Namun, berkaca pada kondisi Indonesia di mana angka masyarakat kelas menengah makin besar dan peningkatan capaian target *Millenium Development Goals* yang terus naik dibandingkan negara-negara lainnya yang juga masih dalam tahap baru memulai demokrasi maupun telah menjadi demokratis, Indonesia terbilang menjadi kasus yang berhasil.

Meski pemilu di Indonesia sering dikritisi karena dianggap menimbulkan konflik dimana-mana. Namun, dari sisi ini, hal tersebut menurut Jan H. Pierskalla dari Ohio State University tidak sepenuhnya benar. Pemilu di Indonesia benar bisa menimbulkan konflik, namun berdasarkan statistik dan analisis kuantitatif dalam risetnya, Pierskalla menemukan bahwa konflik umum dan bahkan konflik separatistis di daerah malah cenderung menurun.⁴⁶ Belakangan, meski ada banyak pertanyaan mengenai keberlangsungan demokrasi Indonesia. Faktanya, Indonesia sebagai negara demokrasi masih bertahan, berkembang dan bertransformasi dalam semua sisi. Baik pada level struktur di daerah hingga pusat, pada pola dan sistem, hukum serta kelembagaan dan masyarakatnya. Berdasarkan riset Puskapol UI, fenomena saat ini menunjukkan makin rasionalnya pemilih dalam mengikuti proses pemilu. Dari keseluruhan pemilih, hanya 30 % yang memilih atas dasar uang dan 18 % dari mereka yang bisa dimobilisasi untuk memilih kandidat tertentu.⁴⁷

⁴⁵Norm Kelly dan Sefakor Ashiagbor . *Partai Politik dan Demokrasi dalam Perspektif Teoritis dan Praktis*. (Washington DC: National Democratic Institute., 2011). Hal.4

⁴⁶Puskapol. "Lembar Fakta". <http://www.puskapol.ui.ac.id/wp-content/uploads/2014/10/LEMBAR-FAKTA-PILKADA-LANGSUNG.pdf> Diakses pada tanggal 12 November 2014

⁴⁷Puskapol. "Lembar Fakta". <http://www.puskapol.ui.ac.id/wp-content/uploads/2014/10/LEMBAR-FAKTA-PILKADA-LANGSUNG.pdf> Diakses pada tanggal 12 November 2014

Hal ini menjadi indikasi bahwa kekhawatiran akan identitas demokrasi Indonesia yang dianggap mulai meredup bahkan luntur ternyata tidak benar. Indonesia malah mampu mempertahankan dan bertransformasi menjadi negara demokrasi yang sistem, lembaga, hukum dan masyarakatnya adalah contoh bagi model demokrasi untuk negara-negara lainnya. Adapun ke depan Indonesia akan terus menghadapi tantangan-tantangan lama dan baru seputar sistem demokrasi yang telah berlangsung dalam dekade. Untuk itu, Indonesia Namun, sistem yang ada saat ini masih menjadi pilihan terbaik yang bisa diambil dan diharapkan mampu membawa Indonesia bukan hanya sebagai 'role model' bagi negara lain terutama negara berkembang bahwa transformasi ekonomi harus dibarengi dwengan transformasi politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Norm Kelly dan Sefakor Ashiagbor . *Partai Politik dan Demokrasi dalam Perspektif Teoritis dan Praktis*. Washington DC: National Democratic Institute., 2011.
- Lowy Institute. *Indonesia's 2009 Elections: Populism, Dynasties and the Consolidation of the Party System*. Lowy Institute 2009.
- Ikrar Nusa Bhakti. *The Transition To Democracy In Indonesia: Some Outstanding Problems*. Dalam *In The Asia Pacific : A Region in Transition* , ed. Jim Rolfe. Honolulu: The Asia Pacific for Sceurity Studies,2004.
- Alexander Wendt. *Social Theory of International Relations*. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.
- Peter J. Katzenstein.. *The Culture of National Security: Norms and Identity in World Politics* New York: Columbia University Press, 1996.
- Rogers Brubeker dan Frederick Cooper. *Beyond Identity*. (Theory and Society 29: 1 47, 2000. Kluwer Academic Publisher, 2000.
- Norm Kelly dan Sefakor Ashiagbor, *Partai Politik dan Demokrasi dalam Perspektif Teoritis dan Praktis*. (Washington DC: National Democratic Institute., 2011)

Website

Puskapol. "Lembar Fakta". <http://www.puskapol.ui.ac.id/wp-content/uploads/2014/10/LEMBAR-FAKTA-PILKADA-LANGSUNG.pdf> Diakses pada tanggal 12 November 2014

Rumah Pemilu. *Gambaran Singkat Pemilihan Umum 2014*. Diakses pada <http://www.rumahpemilu.org/in/read/4030/Gambaran-Singkat-Pemilihan-Umum-2014-di-Indonesia>

Sana Hana. *Democracy and Islam in Indonesia: The 'Perfect Model' for Islam and Democracy?*. Diakses pada <http://www.lboro.ac.uk/media/wwwlboroacuk/content/phir/documentsandpdfs/topstudentessays/11EUC664%20essay%20-%20Sini%20Haara%20-%20Indonesia%20%20The%20%E2%80%98Perfect%20Model%E2%80%99%20for%20Islam%20and%20Democracy.doc.pdf>. Lihat Ghassan Salame, *Introduction: Where Are the Democrats?*, dalam *Democracy Without Democrats?: The Renewal of Politics in the Muslim World*, ed. Ghassan Salame (London: I.B. Tauris, 1994)

Kompas. *Negara Lain Memandang Islam dan Demokrasi Jalan Beriringan*. Diakses pada <http://nasional.kompas.com/read/2014/12/19/17522321/.Negara.Lain.Memandang.Indonesia.karena.Islam.dan.Demokrasi.Jalan.Beriringan>. Tanggal 22 November 2014.

Aung Kyaw Phyo. *Policy Outcomes In Indonesia Before And After Democratization*. Diakses pada http://www.martin.uky.edu/centers_research/Capstones_2012/Phyo.pdf tanggal 21 November

Republika.2014. *Terima Gelar Doktor HC Dari Jepang, SBY Bicara Soal Demokrasi*. <http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/14/09/29/ncn99h-terima-gelar-doktor-hc-dari-jepang-sby-bicara-soal-demokrasi>

Chicaho University. *Edmund Burke Speech to the Electors of Bristol 3 Nov. 1774*. <http://press-pubs.uchicago.edu/founders/documents/v1ch13s7.html> Diakses pada tanggal 21 November 2014

The Third Wave of Democratization in Latin America Advances and Setbacks. Cambridge: Cambridge University Press.

http://isites.harvard.edu/fs/docs/icb.topic925740.files/Week%206/Mainwaring_Latin.pdf

Diakses pada tanggal 12 November 2014

Puskapol. 2014. "Lembar Fakta". <http://www.puskapol.ui.ac.id/wp-content/uploads/2014/10/LEMBAR-FAKTA-PILKADA-LANGSUNG.pdf> Diakses pada tanggal 12 November 2014

Penelitian

Kopel.. *Pembiayaan Partai Politik Sulawesi Selatan 2013*. Penelitian Kerjasama Kemitraan dan Kopel.

Jurnal

Zane goebel. *Enregistering Ethnicity and Hybridity in Indonesia*. (JSL:Volume 4:2008)

Michael Buhler. *Islam and Democracy in Indonesia Insight Turkey*. (Insight Turkey: Vol. 11 / No. 4 / 2009)

Gerd Schönwälder. *Promoting Democracy What Role for the Democratic Emerging Powers?* (Discussion Paper 2/2014)

Michael Buehler. *Islam and Democracy in Indonesia Insight Turkey*. (Insight Turkey: Vol. 11 / No. 4 / 2009)

Kemenkumham. *Partai Politik Dan Demokrasi Indonesia Menyongsong Pemilihan Umum 2014*. Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.9 No.4 Desember 2014